RENCANA AKSI
DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Rencana Aksi Tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Insstansi Pemerintah.

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 , Rancangan RPD 2023-2026 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada Tahun 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Serang, Januari 2024

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640614 199803 2 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR ……		**2**
DAFTAR ISI ……		**3**
BAB I	**PENDAHULUAN**	4
	……	4
	1.1. Latar Belakang……	6
	1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ……	11
	1.3. Landasan Hukum……	
BAB II	**RENCANA STRATEGIS**	15
	……	
	2.1. Tujuan dan Sasaran……	15
	2.2. Program dan Kegiatan……	17
BAB III	**RENCANA AKSI ……**	20
	3.1. Rencana Program dan Kegiatan ……	20
	3.2. Rencana Aksi Jadwal Kegiatan ……	32
BAB IV	**PENUTUP……**	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : ”kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan

kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi merupakan bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; Perda no. 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016**.** Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan

merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Aksi Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Rancangan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-3026 dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan

Pangan dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang semula diatur dalam Pergub No 8/2016, kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, ayat 1 dan 2. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62).

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Paragraf 2, Pasal 61) adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan;
d. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
e. Kepala Bidang Pengakenaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62):

(a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
(b) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
(c) Penanganan Kerawanan Pangan;
(d) Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
(e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:

a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;

b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), *Good Handling Practice* (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), *Hazard Analysis Critical Control Poin* (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistim mutu;
c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan *Good Agriculture Practices* (GAP);
d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan
e. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provsinsi Banten (Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)

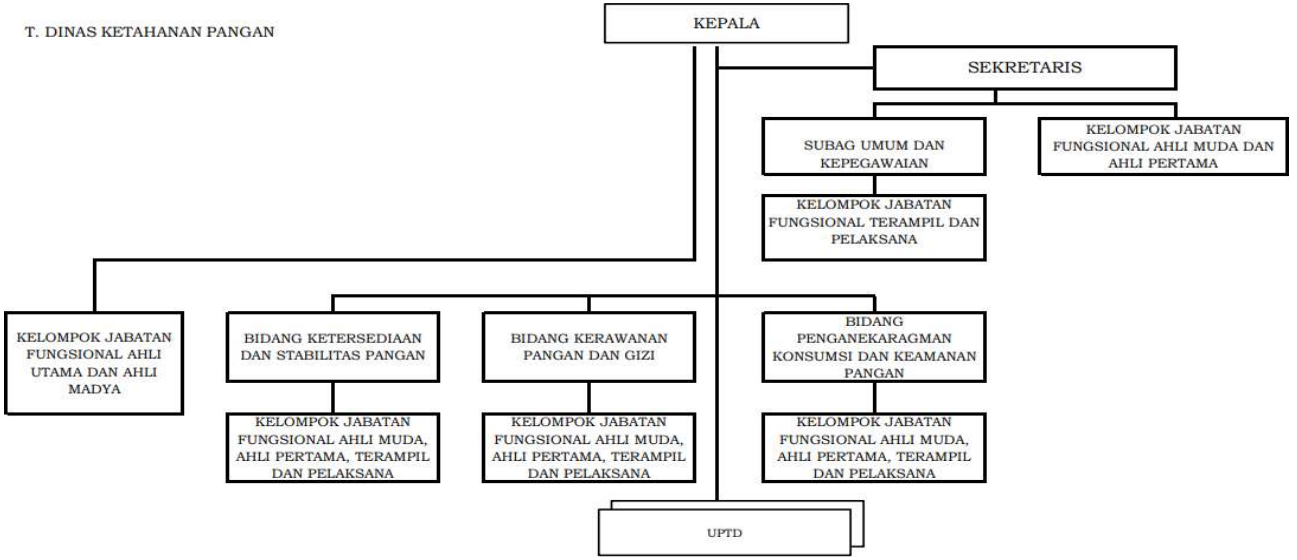

Gambar 2.2

Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

(Peraturan Gubernur Banten NOMOR 19 TAHUN 2018)

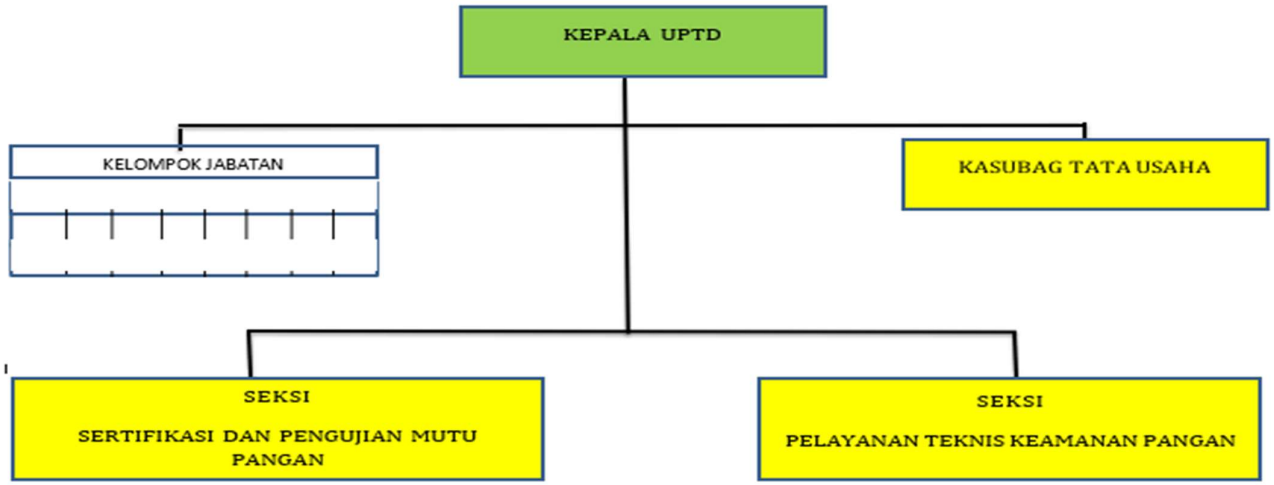

1.3. Landasan Hukum

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pambangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2018);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
23. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang RENSTRA
25. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.539-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Banten;

26. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Provinsi Banten.

BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1. Tujuan dan Sasaran

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan.

Selanjutnya misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah ;

1. **Misi kedua, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.** Tujuan misi ke-2 adalah Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Dengan sasaran adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
2. **Misi ke-4 (empat)** yaitu **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa**, dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih dan berwibawa. Sedangkan sasaran adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Adapun tujuan dalam Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandiriaan pangan
2. Penyusunan peta jalan ketahanan pangan
3. Update Peta FSVA
4. Pengentasan daerah rawan pangan

5. Meningkatkan pelayanan UPTD Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan.
6. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Sementara sasaran rencana kerja yang didasarkan pada dokumen rencana strategis pada Tahun 2024adalah :

a. Menyediakan Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya.
b. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energy dan protein masyarakat Banten, energy sebesar 2.400 kkal/kapita /hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.
c. Tertanganinya 4 Kecamatan Rawan Pangan berdasarkan indikator NCPR.
d. Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (CPP).
e. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis dibawah *Coefficient of Variation* (cv) yang telah ditentukan dan harga gabah ditingkat petani.
f. Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, LUPM dan Gapoktan).
g. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
h. Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85 pada Tahun 2024.
i. Terupdatenya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Banten.
j. Tercapainya tingkat keragaman konsumsi pangan perkapita/hari untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan /AKG).
k. Terawasinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terperiksa sebesar 90% aman di konsumsi.
l. Meningkatnya PSAT yang disertifikasi dan registrasi (No Pendaftaran) 25/30 setiap tahun.

m. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

2.2 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024

Berdasarkan RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026, fungsi Dinas Ketahanan Panngan berada kedalam Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, memiliki 5 (lima) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan; Dan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang harus dicapai yaitu : Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70-80.

   Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain :

   1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
9) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
10) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
11) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

2. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (100%), pencapaian indicator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Outcame yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (88%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
   1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
   2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi; dan
   3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (50%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
   1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi; dan
   2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan, Outcome : Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (50%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
   2) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
   3) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;

BAB III
RENCANA AKSI

3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

Pagu Anggaran Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 sebesar Rp. **30.691.088.026**,-, yang dibagi dalam beberapa Program tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 23.177.084.026,-;
2. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 5.459.004.000,-;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 1.475.000.000,-; Dan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 530.000.000,-.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pedanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermeditate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pedanaan Tahun 2024		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp		
Dinas Ketahanan Pangan								
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**100 Persen**	**29.661.899.000**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**100 Persen**	**260.000.000**	**Sekretaris Dinas**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	73.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	12.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	12.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	10.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	10.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Dokumen	85.000.000		Kec. Curug Kota Serang

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	58.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100 Persen**	**19303425726**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		60 Orang/Bulan	18.862.925.726		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	390.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	15.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	3.500.000		Kec. Curug Kota Serang
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	3.500.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Dokumen	28.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**100 Persen**	**74.878.500**	**Sekretaris Dinas**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	74.878.500		Kec. Curug Kota Serang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**100 Persen**	**863973800**	**Sekretaris Dinas**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	12.705.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	127914000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	300.000.000		Kec. Curug Kota Serang

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	60.500.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	15.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan		1 Laporan	20.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	320854800		Kec. Curug Kota Serang
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	7.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 Persen**	**1963630000**	**Sekretaris Dinas**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.630.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	650.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.310.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 Persen**	**475466000**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		18 Unit	311662000		Kec. Curug Kota Serang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		107 Unit	76855000		Kec. Curug Kota Serang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	86.949.000		Kec. Curug Kota Serang

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**	**Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	**Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi**		**100 Persen**	**50.000.000**		
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**		**100 Persen**	**50.000.000**	**Kabid Kerawanan Pangan dan Gizi**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		1 Laporan	50.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**		**88 Persen**	**5.459.004.000**		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**100 Persen**	**1.233.918.000**	**Kabid Ketersediaan dan Stabilitas Pangan**	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1 Laporan	616.726.000		8 Kabupaten/Kota
		Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		1 Laporan	92.192.000		8 Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis		1 Laporan	300.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		10 Unit	100.000.000		Kab. Pandeglang, Lebak dan Serang
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi		1 Laporan	75.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen	50.000.000		Kec. Curug Kota Serang

		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**		**100 Persen**	**2.950.086.000**	**Kabid Ketersediaan dan Stabilitas Pangan**	
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		200 Ton	300.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		188 Ton	2583000000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		1 Laporan	100.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**		**100 Persen**	**1.275.000.000**	**Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		3 Laporan	600.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		3 Laporan	600.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi		1 Laporan	75.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**		**50 Persen**	**1.950.000.000**		**27,78 Persen**
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	**Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**		**1 Dokumen**	**100.000.000**	**Kabid Kerawanan Pangan dan Gizi**	

		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		1 Dokumen	100.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	**Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**		**5 Dokumen**	**1.375.000.000**	**Kabid Kerawanan Pangan dan Gizi**	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		5 Dokumen	1.150.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		1 Dokumen	50.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		1 Laporan	100.000.000		8 Kabupaten/Kota
		Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi		1 Dokumen	75.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**		**50 Persen**	**330.000.000**		
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**100 Persen**	**330.000.000**	**Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		1 Dokumen	330.000.000		8 Kabupaten/Kota
UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan								
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**100 Persen**	**235.710.000**		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	164.150.000	**Ka UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamaan Pangan**	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	31.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	38.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	18.150.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	3.630.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	68.370.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100 Persen**	**3.630.000**	**Ka UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamaan Pangan**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.630.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**67.930.000**	**Ka UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamaan Pangan**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3 Unit	39.930.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	28.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**		**50 Persen**	**200.000.000**		
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**100 Persen**	**200.000.000**	**Ka UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamaan Pangan**	

		Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		15 Sertifikat	100.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		1 Dokumen	50.000.000		Kec. Curug Kota Serang
		Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		1 Dokumen	50.000.000		Kec. Curug Kota Serang
	TOTAL					**30.691.088.026**		

3.2. Rencana Aksi Jadwal Kegiatan dan Program

MATRIK RENCANA AKSI/JADWAL KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Indikator Sub Kegiatan	Target /Satuan	Rencana Triwulan I			Rencana Triwulan II			Rencana Triwulan III			Rencana Triwulan IV		
					Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
INDUK																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen												
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.862.925.726	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan												
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	390.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen												

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen													
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen													
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen													
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.878.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang													
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.705.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127914000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.500.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen													
	Penyediaan Bahan Material	20.000.000	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan													
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320854800	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan													
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.630.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan													
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan													

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.310.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.662.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76855000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.949.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit													
PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	50.000.00	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	10 Unit													
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	50.000.00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan													
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	600.000.000	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan													
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	616.726.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan													
	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	92.192.000	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	300.000.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan													

	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	100.000.000	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit													
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	75.000.000	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan													
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	50.000.000	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen													
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	300.000.000	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200 Ton													
	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2583000000	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	188 Ton													
	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan													
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	200.000.000	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen													
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	600.000.000	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Dokumen													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	600.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	3 Laporan														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	75.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan													
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen													
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	100.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen													

	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	100.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan													
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	75.000.000	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen													
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Dokumen													
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	330.000.000	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen													
UPTD																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket													

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.150.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.630.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen													
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.370.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.630.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.930.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit													
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Sertifikat													
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen													
	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen													

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Aksi terhadap rencana kerja mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan merupakan dasar pedoman dalam evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.